

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH,  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM INFORMASI  
AKUNTANSI TERHADAP PROSES PELAPORAN KEUANGAN KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA**

**THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNALAL CONTROL SYSTEM, HUMAN  
RESOURCE COMPETENCY, AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  
TO THE QUALITY OF THE LOCAL GOVERNMENT OF MALUKU BARAT  
DAYA**

**Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy<sup>1a</sup>**

<sup>1a</sup> Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura  
Jl. Ir. M. Putuhen, Kampus Unpatti Poka-Ambon- Kode Pos 972333

<sup>a</sup> Korespondensi: Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy, E-mail: philiafina89@gmail.com

(Diterima: 28-09-2018; Ditelaah: 29-09-2018; Disetujui: 30-10-2018)

**ABSTRACT**

This was study aimed to examined the effect of government Internalal control systems, human resource competencies and the use of accounting information systems on the quality of Local Government Financial Statements. The population of this research are government officer in Kabupaten Maluku Barat Daya. Sampling was conducted using a judgment sampling method and number of samples are 44 respondents. Technique of data collection is survey by using questionnaires. Analysis using multiple regression analysis. The results showed that human resource competence had a positive and significant effect on the quality of local government financial statements. While the government's Internalal control system and the use of accounting information systems do not significantly affect the quality of local government financial statements.

Keywords: Accounting information systems, Government Internalal control systems, human resource competencies, local government financial statements.

**ABSTRAK**

Penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intenal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap mutu dan kualifikasi hasil pelaporan sistem keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Populasi penelitian ini adalah pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Metode penelitian yang diterapkan berupa *judgement sampling* sebanyak 44 sampel didaerah. Teknik survei dengan menggunakan kuisisioner digunakan dalam penelitian dan pengolahan data secara statistik menggunakan regresi linear berganda. Hasil dilapangan didapatkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di kabupaten Maluku Barat Daya berpengaruh positif dan secara signifikan berhubungan dengan kualitas pelaporan hasil kuangan daerah yang dihasilkan, sementara sistem pengendalian Internalal pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya serta penggunaan sistem informasi akuntansi didaerah ini tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah yang selalu disampaikan tiap tahunnya.

Kata Kunci: Kompetensi SDM, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

---

Leiwakabessy. (2020).Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kompetensi Sumber Daya Manusia, . *Jurnal Sosial Huamniora*, 11(2), 214- 224.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan lembaga yang sah dan diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintah yang bersumber dari hati nurani masyarakat. Oleh karenanya itu masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya sangat mendambakan agar roda pemerintahan yang saat ini sedang dijalankan oleh pimpinan tertinggi di tingkat kabupaten selama kurun waktu 4 tahun dapat mengakomidir prinsip *good governance*, yang jauh dari penerapan pungutan liar, penggunaan anggaran untk kepentingan kelompok hingga pelegitimasi model korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam mengelola pemerintah kabupaten. Di Indonesia, sesuai dengan semangat reformasi, tuntutan untuk mewujudkan semangat dan jiwa reformasi demi terciptanya pemerintahan yang tidak tercemar dan bebas dari hal – hal yang merugikan masyarakat. Penjabaran tugas dan fungsi pemerintahan kabupaten secara baik dan benar ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut yakni, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sector publik, khususnya di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah maka pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan ini tentunya harus disajikan secara tepat waktu dan sesuai dengan dasar dan norma dalam akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan.

Dalam aturan perundangan yang termuat secara gamblang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan unit

pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat yakni laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran keuangan daerah terdiri dari 3 jenis laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sementara itu Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Sistem akuntabilitas publik memerlukan saluran- saluran pertanggungjawaban yang tersistem dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya praktik penyimpangan dalam pemerintahan. Salah satu fungsi yang harus ada dalam proses akuntabilitas publik adalah fungsi audit. Dengan adanya fungsi atau mekanisme audit di sector publik, diharapkan dapat mewujudkan tercapainya akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, BUMN, atau instansi pengelola aset Negara lainnya. (Bastian, 2006). Menurut peraturan perundangan Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa tugas lembaga ini yakni memeriksa proses pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang adalah milik negara yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah pusat, propinsi, kabupaten maupun lembaga negara lainnya berdasarkan undang-undang. Pemeriksaan tidak berfokus pada pemeriksaan keuangan, namun meliputi pemeriksaan semua kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Badan Pemeriksa Keuangan, 2006). Hasil akhir audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten berupa laporan audit yang menyatakan opini auditor terhadap laporan keuangan pemerintah yang diauditnya. Opini audit tersebut mencakup Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan BPK atas 542 Laporan Keuangan Daerah tahun 2018 menungkapkan opini WTP atas 443 LKPD, opini WDP atas 86 LKPD dan opini TMP atas 13 LKPD (IHPS 1 Tahun 2019). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, khusus untuk tahun 2018 salah satu LKPD yang

mengalami penurunan opini adalah LKPD pemerintah Provinsi Maluku dari opini WTP menjadi WDP. Selain itu terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari tahun 2014 hingga tahun 2018 belum memperoleh opini WTP, diantaranya adalah Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur (Tabel 1).

Tabel 1. Daftar Opini BPK Terhadap LKPD Beberapa Kabupaten di Maluku.

Entitas Pemerintah Daerah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Buru Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
Kabupaten Kepulauan Aru	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
Kabupaten Maluku Barat Daya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kabupaten Seram Bagian Barat	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
Kabupaten Seram Bagian Timur	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (BPK RI, 2019)

Tabel diatas ditemukan bahwa untuk LKPD yang belum mendapat opini WTP, karena terdapat kabupaten yang memiliki akun dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP atau tidak didukung bukti yang cukup. Misalnya untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak memiliki bukti yang cukup meliputi akun aset, baik berupa aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu akun aset lancar, aset tetap, aset lainnya, belanja operasi dan belanja modal.

Opini WDP dan TMP untu LKPD pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang belum mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir menggambarkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah yang merupakan gambaran pengelolaan keuangan daerah selama satu periode belum dapat dilaksanakan secara baik dan berkualitas. Kualitas LKPD perlu ditingkatkan,

sehingga informasi yang dimuat dalam laporan tersebut dapat berguna bagi pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun nasional. Serta menjadi salah satu sarana perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris beberapa faktor yang dianggap dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu sistem pengendalian Internal pemerintah, penggunaan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia. Khususnya pada Pemerintah daerah di Provinsi Maluku yang belum berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satunya, yaitu Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

## MATERI DAN METODE

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyampaian laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Mardiasmo (2002), Laporan keuangan yang disusun oleh Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan representasi dari posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan selama satu tahun oleh bupati bersama perangkat daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, serta sebagai sarana untuk menunjukkan akuntabilitas dan entitas pelaporan keuangan atas sumber daya yang ada di daerah. (Bastian, 2006). Laporan keuangan Pemerintah kabupaten umumnya meliputi laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (PP No. 71 Tahun 2010)

### Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka laporan keuangan dikatakan berkualitas ketika telah memenuhi beberapa karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif yang dimaksud merujuk pada aturan nilai

normatif yang tertuang dalam bentuk data dan informasi akuntansi dan keuangan untuk pencapaian tujuan. Terdapat empat karakteristik yang harus dipenuhi LKPD sehingga dapat dikatakan sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, yaitu: Relevan; Andal; Dapat dibandingkan; Dapat Dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

### Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP No. 60 Tahun, 2008)

Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah dimaksudkan agar seluruh *stakeholder* memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah telah terlaksana secara baik dan berkualitas.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dikatakan baik apabila dapat memenuhi ke - 5 unsur yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Resiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Internal

### Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang melekat pada diri seorang aparatur sipil Negara. Kompetensi yang dimaksud adalah berupa pengetahuan,

keterampilan, dan sikap, perilaku yang diperlukan oleh PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi ini wajib dimiliki oleh seorang PNS sehingga dapat mengemban tugasnya sebagai abdi negara yang profesional, efektif, dan efisien.

Kompetensi sumber daya manusia meliputi kapasitas seseorang atau individu dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau wewenang yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kapasitas seorang individu dapat dilihat dari kemampuannya untuk meneuhi target kinerja yang telah ditetapkan, serta menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) (Nurillah, 2014)

### **Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang tujuannya adalah menghimpun, memproses dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Kieso, Weygandt, & warfield, 2017)

### **Sistem Manajemen Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Untuk membantu pemerintah di tingkat daerah agar dapat melakukan

pengelolaan keuangan dengan sistem yang terintegrasi maka BPKP menyusun suatu program aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Maluku barat Daya agar sesuai dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan dapat bertindak sebagai entitas pelaporan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang digolongkan sebagai entitas akuntansi.

### **Pengembangan Hipotesis**

Implementasi sistem pengendalian Internal pada lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pimpinan maupun seluruh pegawai, diharapkan pada gilirannya dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Salah satu tujuan organisasi pemerintah yang cukup penting adalah perwujudan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sistem pengendalian Internal yang baik akan menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik dan akan menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Fitri (2016) dan Siwambudi, Yasa, & Badera (2017), membuktikan sistem pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

*H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah*

Penelitian Triyanti (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Rusvianto, Mulyani, & Yuliafitri (2018), yang melakukan penelitian terkait kualitas laporan

keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung juga berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, secara berkala mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokoknya serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia yang berkompeten di OPD akan sangat berperan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

*H2: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah*

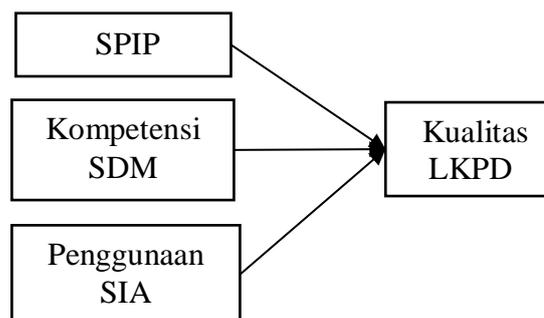
Undang-Undang No. 33 Tahun (2004) Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah perlu adanya suatu sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional. Sistem informasi akuntansi yang digunakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah SIMDA, sehingga dalam penelitian ini memfokuskan peranan/pemanfaatan SIMDA terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dengan menggunakan aplikasi SIMDA, yang dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan, mulai dari tahap *input* transaksi, penjurnalan, posting ke buku besar hingga menghasilkan satu set laporan keuangan yang terkomputerisasi diharapkan dapat mengurangi kesalahan yang mungkin dapat terjadi jika semua proses tersebut dilakukan secara manual. Selain itu dengan penggunaan sistem aplikasi ini diharapkan dapat menghemat

waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

*H3: Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah*

### Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

### Populasi dan Sampel

Penelitian dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dimana populasi dalam penelitian adalah para aparatur sipil Negara yang bekerja di wilayah kabupaten. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgement sampling*. Kriteria yang digunakan bagi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu pegawai OPD yang bertanggungjawab terhadap proses penyusunan laporan keuangan, meliputi kepala OPD, kepala bagian atau sub bagian dan bendahara OPD yang melakukan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran, yaitu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengurus barang.

### Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Dengan teknik survei, data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan kuesioner. Data bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan persepsi mereka terhadap nilai sebuah dokumen laporan keuangan, sistem pengendalian Internal, kompetensi dan penerapan SIA di

lingkungan atau instansi tempat mereka bekerja.

### Pengukuran Variabel

Variabel terdiri dari variabel independen dan dependen.

Variabel independen diukur berdasarkan delapan item pertanyaan sesuai dengan komponen-komponen sistem pengendalian Internal.

Kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Manusia, merupakan kemampuan dan potensi seorang pegawai, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur sipil negara ini dapat melaksanakan tugasnya secara baik, dan bertanggungjawab. Terdapat 5 item pertanyaan yang umumnya dipergunakan dalam mengukur variabel kompetensi SDM.

Penggunaan sistem informasi akuntansi ( $X_3$ ), yaitu penggunaan program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, meliputi relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

### Metode Analisis Data

Sebelum memasuki proses analisis, data yang dikumpulkan perlu diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa setiap item pertanyaan yang telah dikelompokan pada variabel yang tepat. Untuk uji validitas tiap skor indikator diuji korelasinya dengan total skor variabel

atau konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach alpha*. Suatu konstruk dikatakan apabila reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  (Nunnaly, 1967; (Ghozali, 2016). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

Teknik analisa data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah model analisis regresi linear berganda. Persamaanya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y	=	Kualitas Laporan Keuangan
$X_1$	=	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
$X_2$	=	Kompetensi Sumber Daya Manusia
$X_3$	=	Sistem Informasi Akuntansi
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta$	=	Parameter
e	=	Error term

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik, *goodness of fit* ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya (Kuncoro, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan uji validitas diketahui korelasi antara masing-masing indikator/item untuk variabel sistem pengendalian Internal, kompetensi SDM, penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, dan kualitas LKPD tingkat signifikansinya  $< 0,01$  dan  $< 0,05$ . Jadi dapat dinyatakan bahwa setiap indikator/item pertanyaan dalam variabel penelitian ini adalah valid. Selanjutnya uji reliabilitas untuk keempat variabel yang dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, karena seluruhnya memiliki nilai cronbach alpha  $> 0,60$ .

### Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel *residual* mempunyai distribusi normal atau tidak. (Ghozali, 2016). Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov - Smirnov*. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov - Smirnov* adalah 0,612 dan probabilitasnya 0,848. Nilai probabilitas 0,848 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan untuk sistem pengendalian Internal, kompetensi SDM, penggunaan sistem memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya tidak lebih dari 10. Artinya tidak terdapat korelasi antara terlihat bahwa titik menyebar secara acak dan berada diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi atau tidak memiliki model yang jelas, sehingga model ini layak di pakai.

variabel- variabel independen tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas bermanfaat untuk mengetahui model regresi yang digunakan apakah akan terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas digunakan tampilan grafik *scatterplot* (Ghozali, 2016). Dalam tampilan grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik menyebar secara acak dan berada diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi atau tidak memiliki model yang jelas, sehingga model ini layak di pakai.

### Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

### Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	B	t-value	t-tabel	Sig
(Constant)	14,381	2,681	1,6838	0,011
Sistem Pengendalian Internal	-0,129	-0,821	1,6838	0,416
Kompetensi SDM	0,630	3,313	1,6838	0,002
Penggunaan SIA	0,210	0,510	1,6838	0,613
F-Value	4,882			
Sig	0,006			
R <sup>2</sup>	0,266			
Adjusted R <sup>2</sup>	0,211			

Hipotesis pertama (H1) menyatakan sistem pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian (tabel 2) menunjukkan nilai t hitung -0,821 lebih kecil dari nilai t tabel 1,6838 dan nilai

probabilitas 0,416 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa sistem pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini

membuktikan pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, sistem pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sejalan dengan penelitian S Purnomo (2014) pada Kabupaten/Kota Wilayah I Bogor. Sistem pengendalian Internal yang diterapkan pada pemerintah daerah kabupaten Maluku Barat Daya tidak mampu mendukung terciptanya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Untuk itu pemerintah diharapkan perlu memperhatikan pelaksanaan sistem pengendalian Internal pada seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga dapat menunjang kualitas laporan keuangan.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian (tabel 2) menunjukkan nilai  $t$  hitung 3,313 lebih besar dari nilai  $t$  tabel 1,6838 dan nilai probabilitas 0,002 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan instrumen pertanyaan yang digunakan dapat dinyatakan bahwa SDM yang berkompeten dapat diketahui dari latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan pelatihan yang tepat sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah akan semakin baik ketika Sumber Daya Manusia yang menghasilkan laporan tersebut memiliki kompetensi yang memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang oleh, Triyanti (2017), Fitri (2018), yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan sistem informasi akuntansi diduga mempengaruhi dokumen laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Maluku barat daya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Nilai  $t$  hitung 0,513 lebih kecil dari nilai  $t$  tabel 1,6838 dan nilai probabilitas 0,613 lebih besar dari 0,05

menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pengguna SIMDA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya belum mampu memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut dengan efektif dan efisien sehingga tidak mampu berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 juga diketahui, nilai  $F$  sebesar 4,882 dan nilai probabilitasnya 0,006. Karena tingkat probabilitas kurang dari angka 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa perubahan variabel independen dalam model yaitu sistem pengendalian Internal, kompetensi sumber daya manusia, dan penggunaan sistem informasi akuntansi dapat menjelaskan dengan baik variabel dependen, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) adalah 0,211. Hal ini berarti bahwa 21,1% variasi variabel kualitas LKPD dapat dijelaskan oleh ketiga variabel sistem pengendalian Internal, kompetensi sumber daya manusia, dan penggunaan SIMDA. Sedangkan sisanya 78,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## KESIMPULAN

Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh maka disimpulkan bahwa kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang tersebar di Kabupaten Maluku Barat Daya berkorelasi dan berpengaruh secara positif pada hasil pelaporan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah, sedangkan sistem pengendalian Internal dan penggunaan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pada lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kompetensi pegawai yang memadai memberikan kontribusi yang

baik terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun pada sisi lain sistem pengendalian Internal pemerintah yang diimplementasikan di Kabupaten Maluku Barat Daya oleh pimpinan maupun seluruh pegawai sebagai suatu proses yang integral, tidak mampu mendukung terciptanya peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu penggunaan aplikasi SIMDA dalam menghasilkan laporan keuangan juga belum dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu pemerintah diharapkan perlu memperhatikan implementasi sistem pengendalian Internal pada seluruh organisasi perangkat daerah, maupun penggunaan aplikasi SIMDA oleh setiap OPD dan badan pengelola keuangan daerah sehingga dapat menunjang kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun bagi peneliti berikutnya dapat mengidentifikasi faktor-faktor lainnya yang lebih lengkap untuk penelitian pada instansi pemerintah lainnya. Sehingga pemahaman dan generalisasi terhadap parameter yang mempengaruhi hasil dan nilai sebuah laporan keuangan daerah khususnya pada tingkat kabupaten akan lebih komperhensif, khususnya untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum dan tidak pernah menyandang gelar opini WTP dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan baik di propinsi maupun pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654*, 1-25.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta: Andi*.
- BPK RI. (2019). IHPS I Tahun 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*, 1-426. Retrieved from <https://www.bpk.go.id/ihps#>
- Fitri, Y. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Binjai dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.
- Kieso, Weygandt, & warfield. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting. *Salemba Empat*.
- Kuncoro, mudrajad. (2010). Metode kuantitatif: teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi. *System*.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.
- Nurillah, M. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKd), Pemanfaatn Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok).
- Peraturan Pemerintah. (2008). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH. In *pp*. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043>
- Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1-30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internalal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Jurnal Banque Syar'i*, 4(1), 33-67.
- S Purnomo, B. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internalal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6581>
- Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N. (2017). KOMITMEN ORGANISASI

SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI SDM DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

Triyanti. (2017). *AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNALAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Studi Kasus Pada*

*Pemerintah Kabupaten Magelang ) THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE IN THE FIELD OF*. (3), 1-16.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. , CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison § (2004)